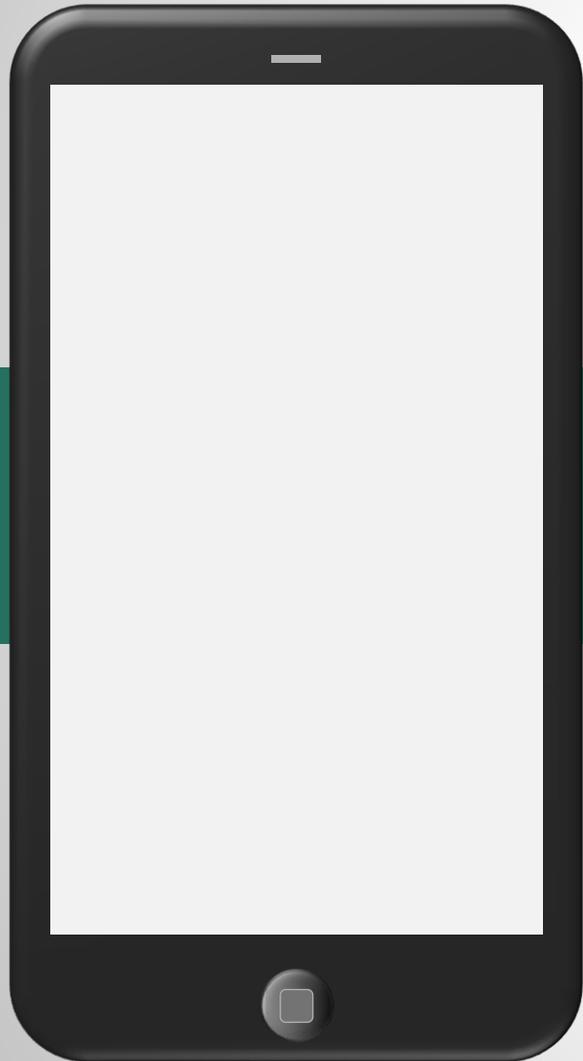


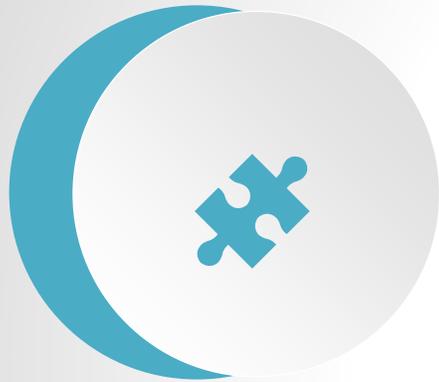


# Riset Indeks Wakaf Nasional

## Tahun 2023



# PENDAHULUAN



Sejumlah tantangan masih menjadi pekerjaan rumah bersama, seperti masih minimnya dukungan dari pemerintah, profesionalisme nazhir, dan tingkat literasi masyarakat



Perlunya melihat dan mencermati perkembangan dan kesuksesan gerakan wakaf di daerah



Perlunya indikator sebagai acuan untuk memotret perkembangan wakaf di daerah





Melakukan asesmen atas kinerja/perkembangan perwakafan di daerah

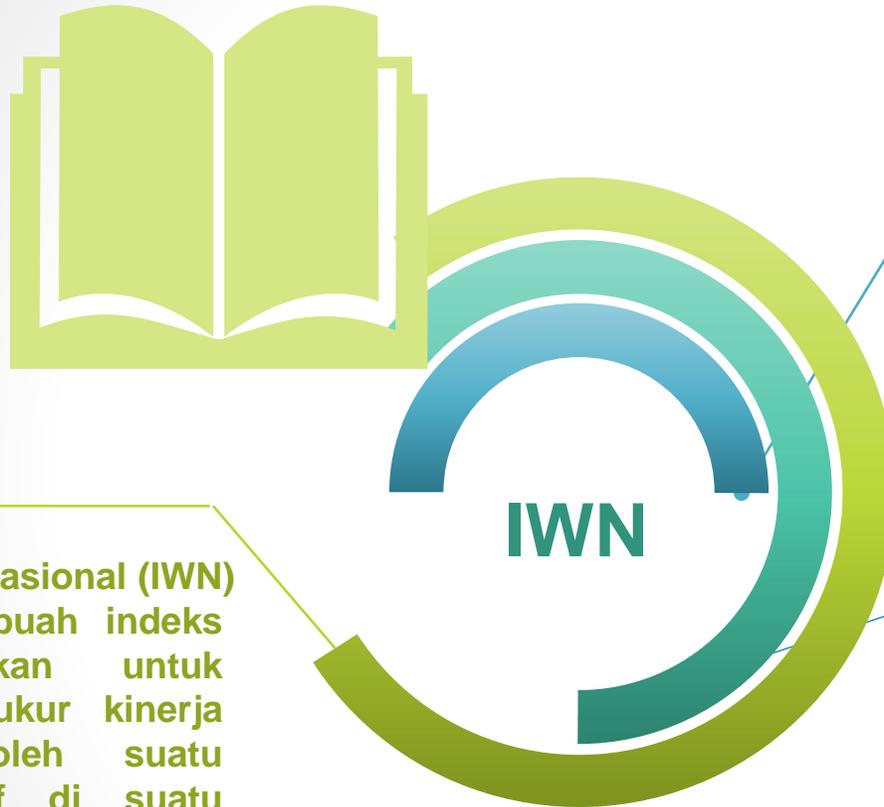


Mengevaluasi peran pemerintah, BWI, nazhir, masyarakat, dan para pemangku kepentingan dalam memajukan perwakafan di daerah



Mendorong perbaikan sistem perwakafan di daerah dengan menggunakan parameter 6 faktor dalam riset IWN





Pengukuran IWN dilandaskan pada data yang diinput oleh otoritas wakaf di tingkat lokal yang kemudian dapat diagregasi di tingkat nasional. IWN disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan untuk diadopsi oleh negara manapun di dunia.

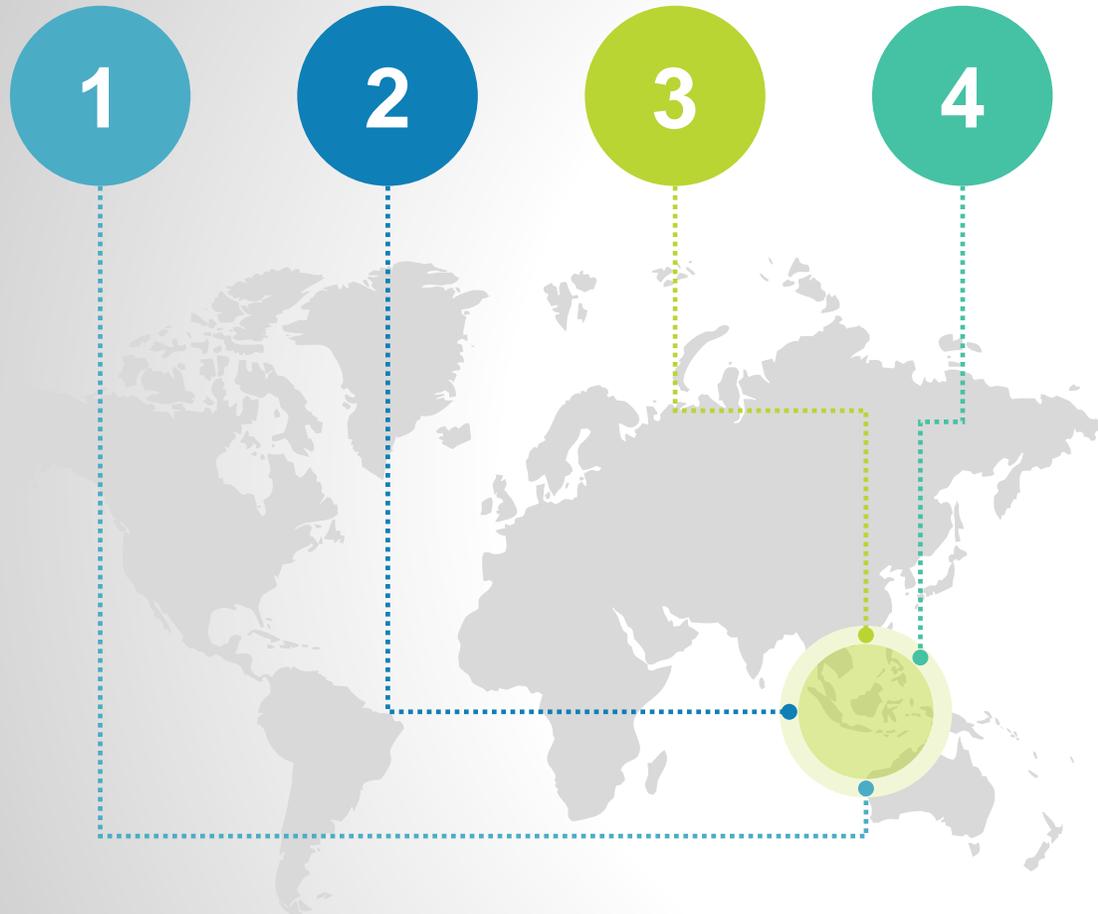


Dalam konteks studi kali ini, pilar-pilar IWN disusun berdasarkan ketentuan regulasi, standard, dan literatur terkait perwakafan di Indonesia. Adopsi oleh negara lain dapat menyesuaikan dengan kondisi pada negara tersebut.



Indeks Wakaf Nasional (IWN) merupakan sebuah indeks yang diusulkan untuk menjadi alat ukur kinerja perwakafan oleh suatu otoritas wakaf di suatu negara di tingkat nasional maupun di tingkat lokal.





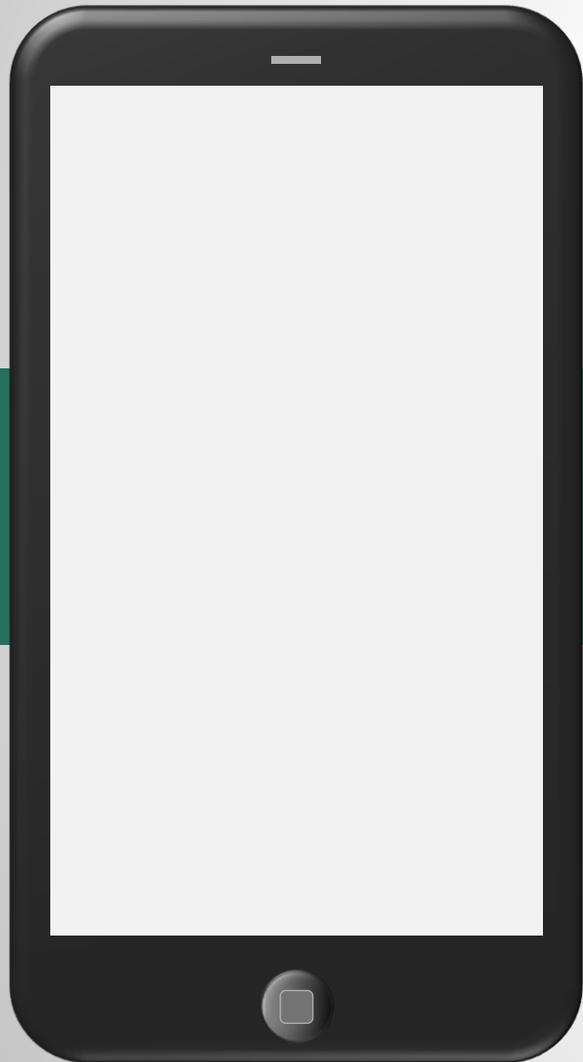
**1** Kondisi dan perkembangan perwakafan di suatu wilayah dapat dipantau secara terukur

**2** Perbandingan kinerja perwakafan dapat diukur antar wilayah maupun antar waktu

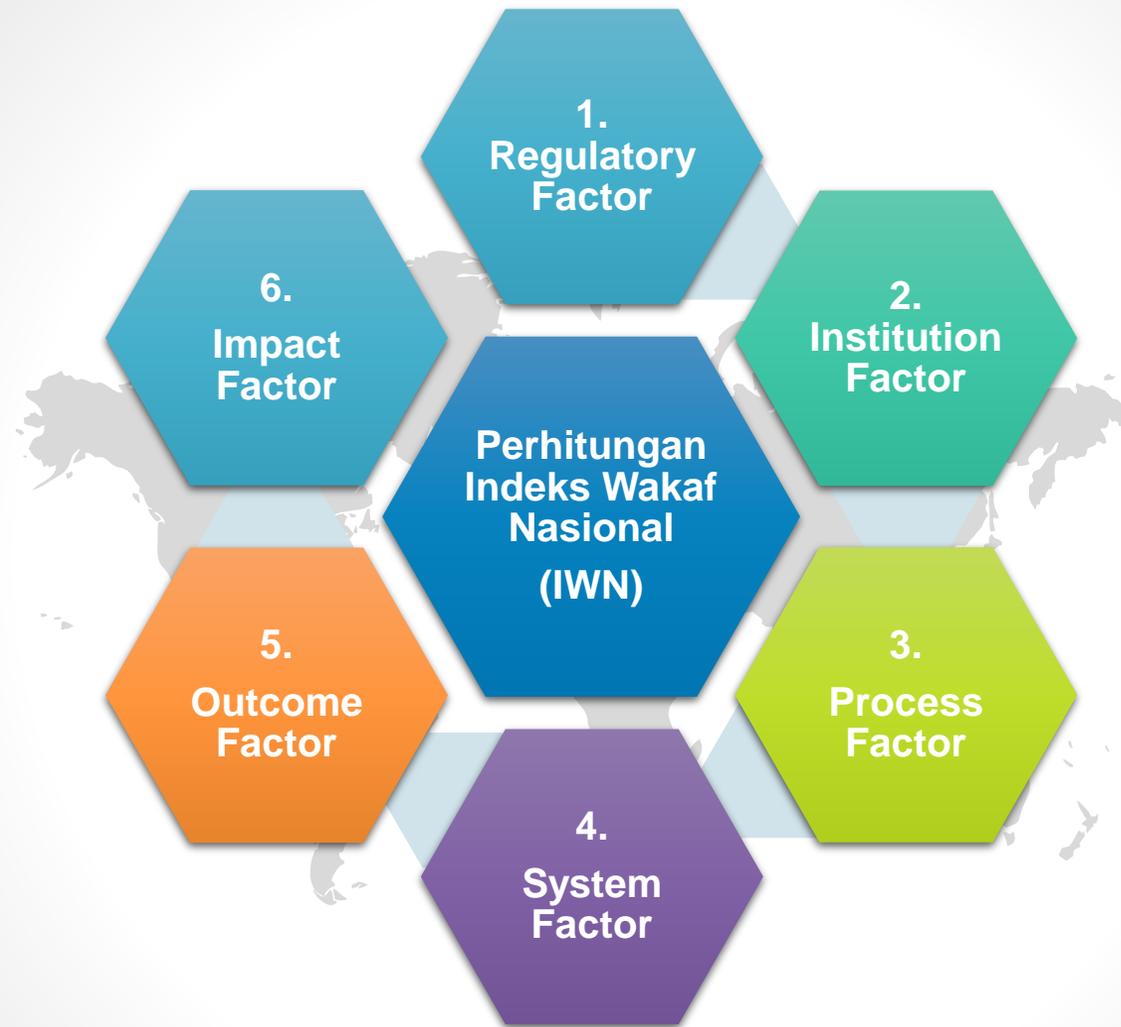
**3** Mendorong regulator dan lembaga wakaf untuk mencapai standar tertentu dalam pengelolaan wakaf yang diukur dalam IWN

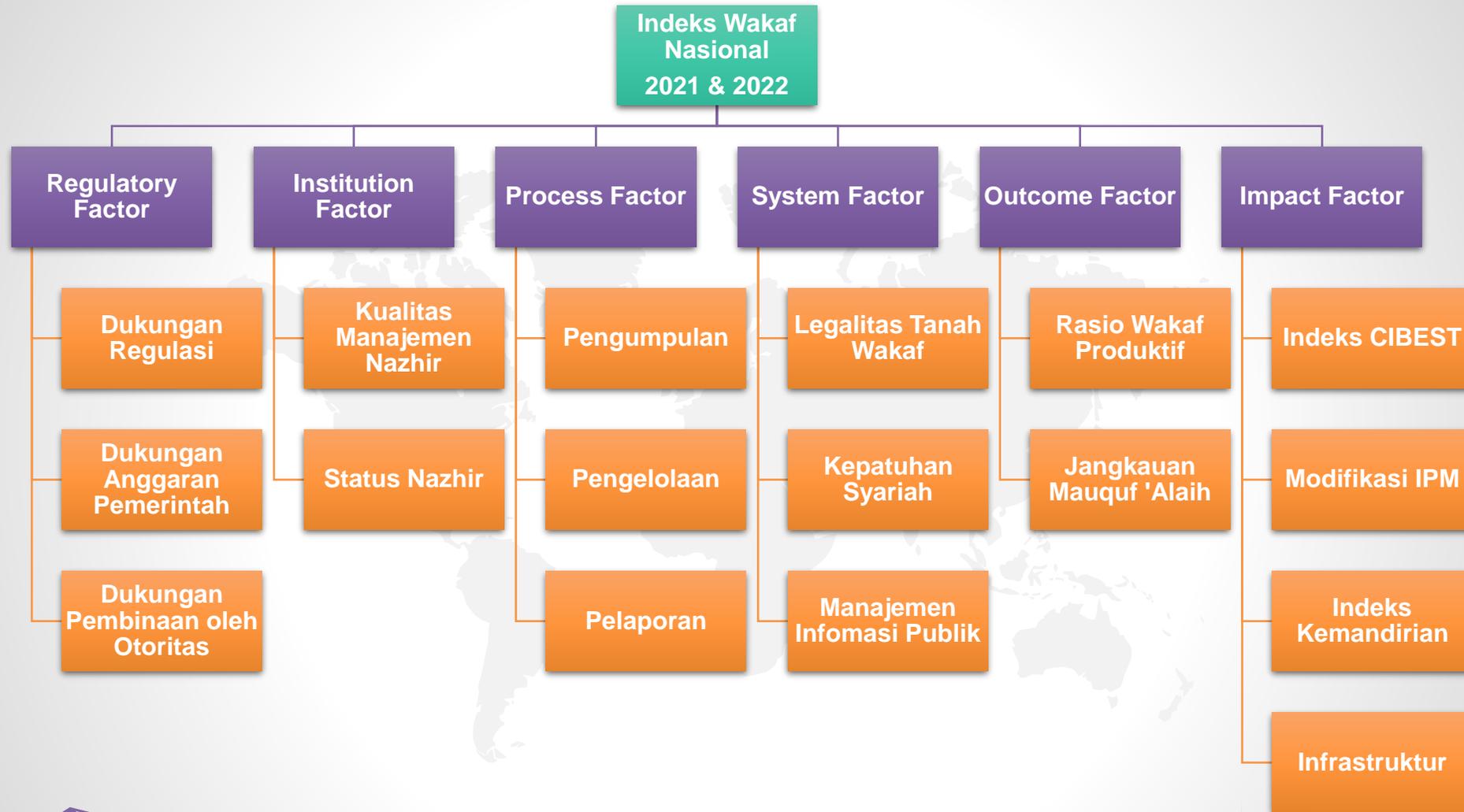
**4** Mengarahkan agar pengelolaan wakaf berorientasi hasil/dampak

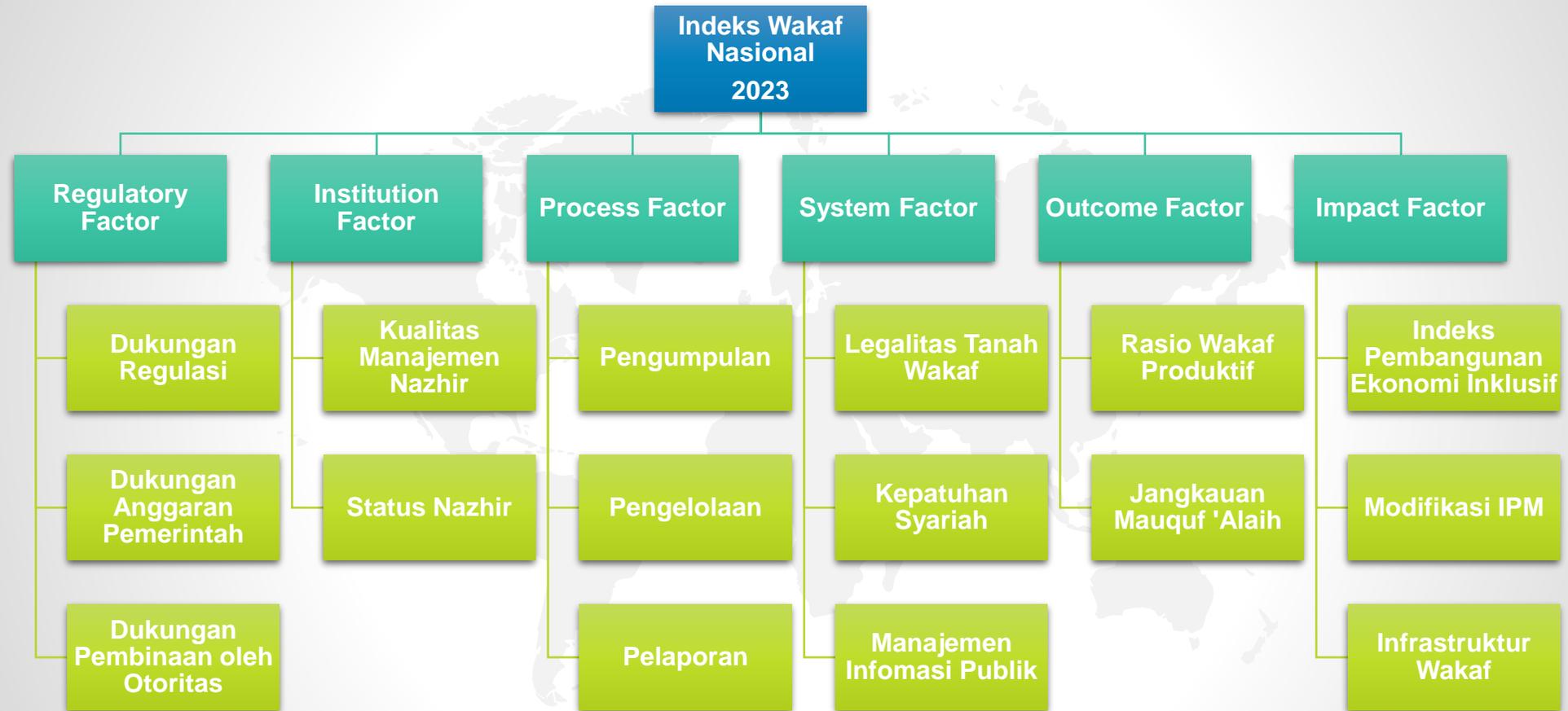




# METODE



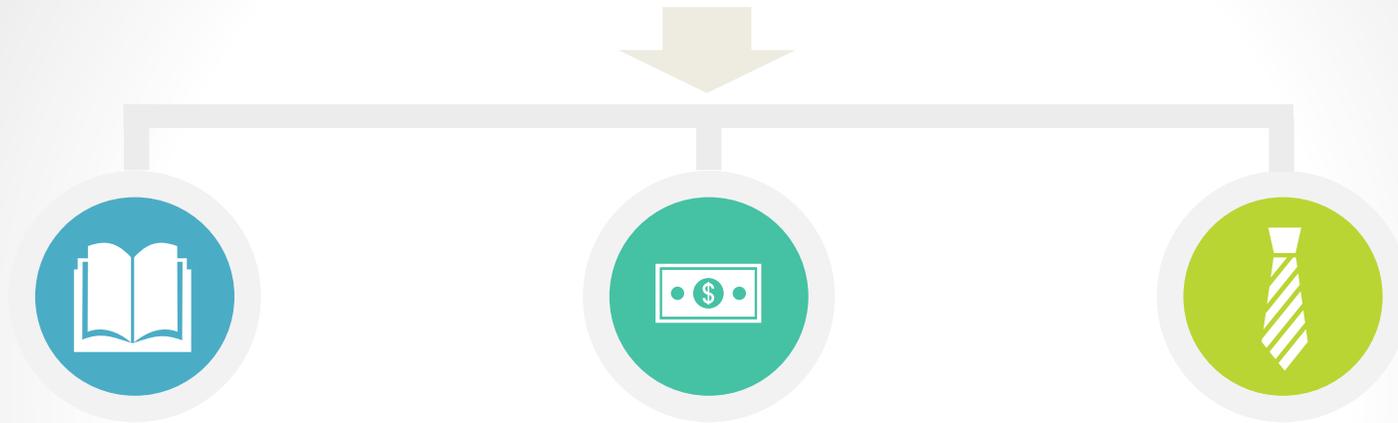




# 1. Faktor Regulasi (*Regulatory Factors*)



Faktor regulasi merupakan faktor yang terkait dengan dukungan strategis pemerintah selaku otoritas terhadap sistem wakaf dan aktivitas perwakafan di wilayah



## 1.1 Dukungan Regulasi

Dukungan regulasi berkaitan dengan pertanyaan apakah suatu negara atau wilayah memiliki undang-undang atau peraturan khusus tentang wakaf di dalam yurisdiksinya.

## 1.2 Dukungan Anggaran

Dukungan anggaran berkaitan dengan pertanyaan tentang jumlah nominal dukungan anggaran untuk pengembangan wakaf yang disediakan oleh pemerintah dibandingkan dengan jumlah anggaran belanja pemerintah.

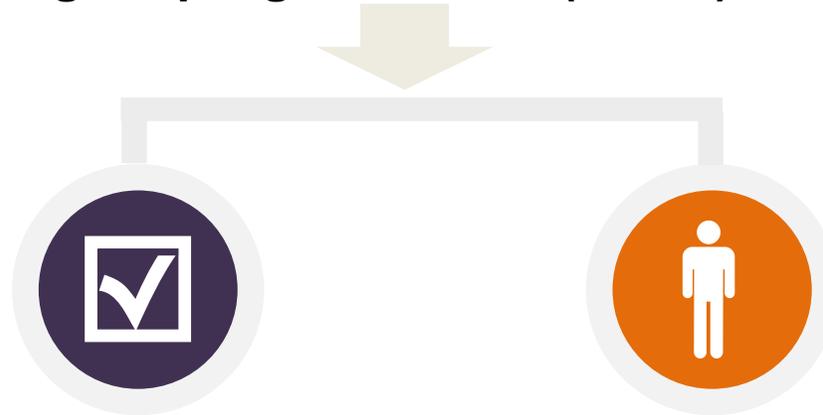
## 1.3 Dukungan Pelatihan

Dukungan pelatihan berkaitan dengan pertanyaan tentang frekuensi pelatihan yang diberikan oleh otoritas wakaf bagi para nazhir (pengelola wakaf) untuk meningkatkan keterampilan manajemen wakaf.

## 2. Faktor Kelembagaan (*Institution*)



Faktor kelembagaan merupakan faktor yang terkait dengan kondisi kelembagaan pengelola wakaf (nazhir) di suatu wilayah



### 2.1 Kualitas Manajemen Nazhir

Kualitas manajemen nazhir berkaitan dengan pertanyaan tentang berapa banyak pengelola wakaf (perseorangan maupun institusi) di suatu wilayah hukum yang telah memiliki sertifikat kompetensi nazhir dari LSP BWI.

### 2.2 Status Nazhir

Status nazhir berkaitan dengan pertanyaan tentang berapa banyak nazhir institusi yang ada di suatu wilayah dibandingkan dengan nazhir perseorangan; dan berapa di antara nazhir institusi tersebut yang sudah terdaftar sebagai nazhir wakaf uang di BWI.

## 3. Faktor Proses (*Process Factors*)



Faktor Proses merupakan faktor yang terkait dengan proses bisnis praktek wakaf



### 3.1 Pengumpulan

Pengumpulan berkaitan dengan pertanyaan tentang jumlah harta wakaf atau pokok yang dikumpulkan oleh semua nazhir dalam suatu wilayah hukum, apakah itu berupa tanah, uang tunai, atau golongan harta lainnya.

### 3.2 Pengelolaan

Pengelolaan berkaitan dengan pertanyaan tentang jumlah keuntungan atau surplus yang dihasilkan oleh semua nazhir dalam suatu yurisdiksi.

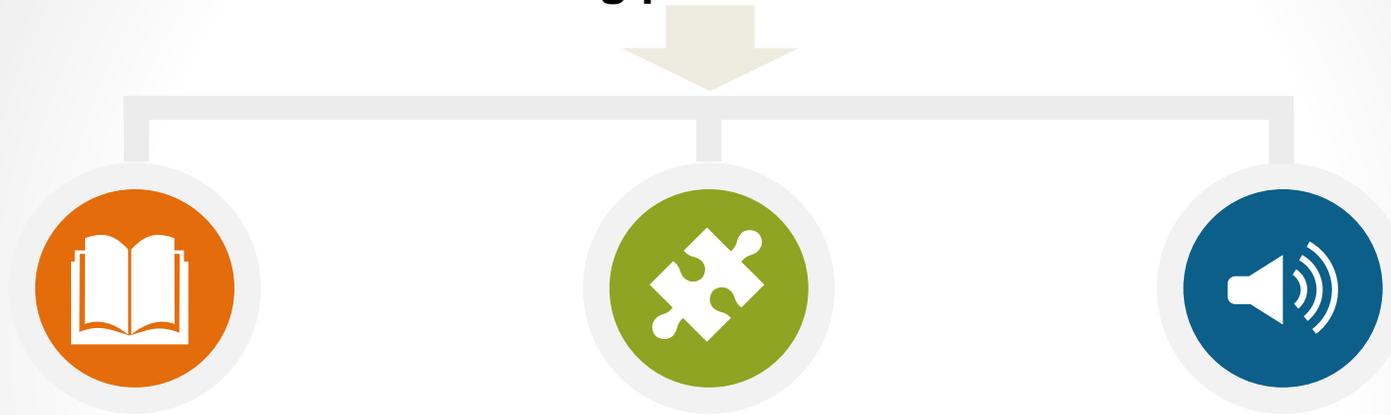
### 3.3 Pelaporan

Pelaporan berkaitan dengan pertanyaan tentang jumlah nazhir kelembagaan yang melaporkan kegiatan dan kondisi keuangannya kepada otoritas wakaf.

## 4. Faktor Sistem (*System Factors*)



Faktor Sistem berkaitan dengan aspek-aspek yang tidak terkait langsung dengan proses bisnis wakaf tetapi penting untuk mendukung proses tersebut.



### 4.1 Legalitas Tanah Wakaf

Legalitas tanah wakaf berkaitan dengan tingkat sertifikasi tanah wakaf di BPN.

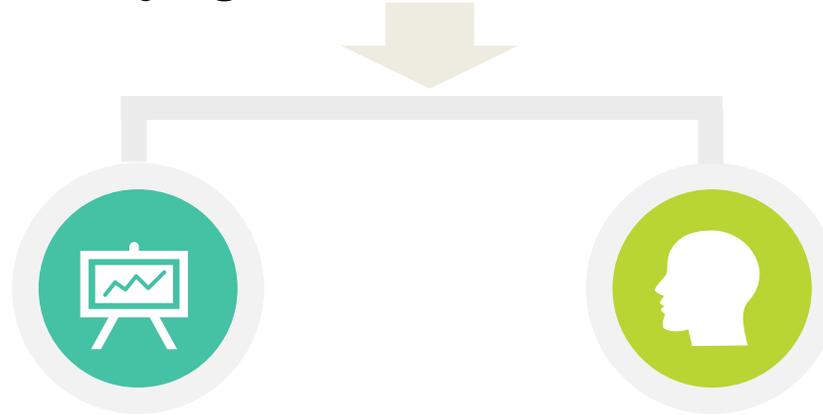
### 4.2 Kepatuhan Syariah

Kepatuhan syariah berkaitan dengan kehadiran Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada nazhir institusi.

### 4.3 Manajemen Informasi Publik

Manajemen informasi publik berkaitan dengan penyediaan informasi publik oleh BWI sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 61 UU Wakaf.

### Faktor hasil berkaitan dengan produktivitas wakaf dan jangkauan manfaat wakaf



#### 5.1 Rasio Wakaf Produktif

Rasio Wakaf Produktif berkaitan dengan pertanyaan tentang proporsi unit wakaf produktif dalam suatu wilayah atas semua unit wakaf.

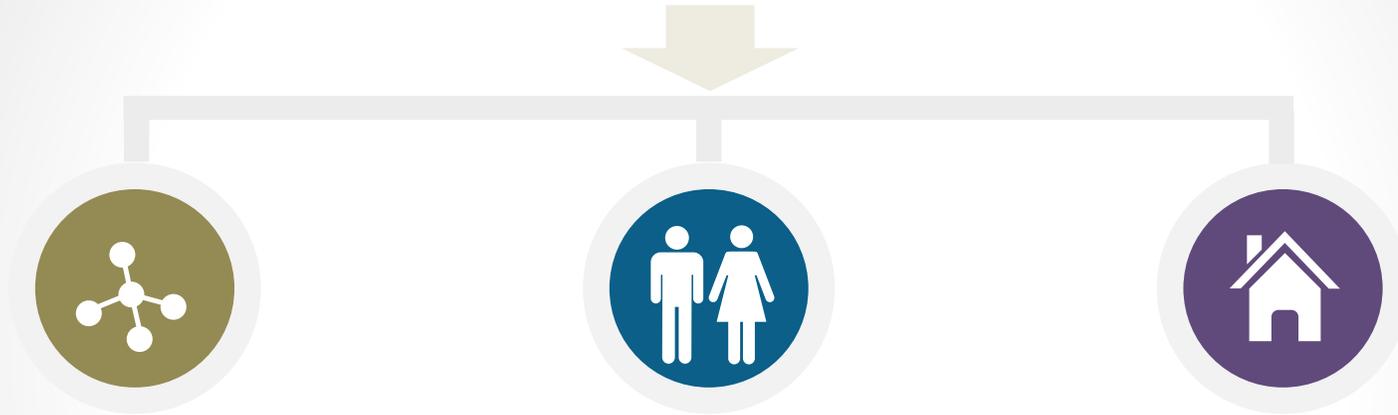
#### 5.2 Jangkauan Penerima Manfaat Wakaf

Jangkauan penerima manfaat berkaitan dengan pertanyaan tentang proporsi penerima wakaf (mauquf alaih) dari total populasi di suatu wilayah.

## 6. Faktor Dampak (Impact Factors)



Faktor dampak adalah faktor yang berhubungan dengan dampak wakaf terhadap kesejahteraan masyarakat dan pemberian pelayanan kepada masyarakat



### 6.1 Indeks Pembangunan Ekonomi Eksklusif

Indikator ini mengukur (1) pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan; dan (2) perluasan akses dan kesempatan

### 6.2 Indeks Pembangunan Manusia (*Modified*)

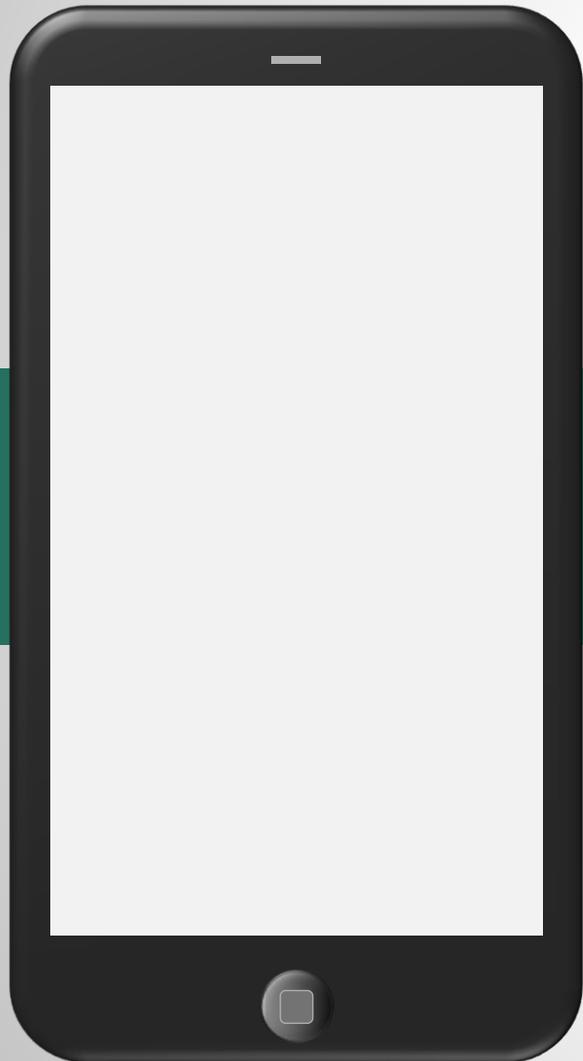
Indikator ini mengukur indeks kesehatan dan pendidikan yang merupakan bagian dari IPM.

### 6.3 Infrastruktur Wakaf

Infrastruktur Wakaf berkaitan dengan kontribusi infrastruktur wakaf terhadap keseluruhan infrastruktur di suatu wilayah. Ada empat sektor yang menjadi fokus dari indikator ini, yaitu dakwah (masjid), pendidikan (sekolah), kesehatan (rumah sakit), dan ekonomi (UMKM).

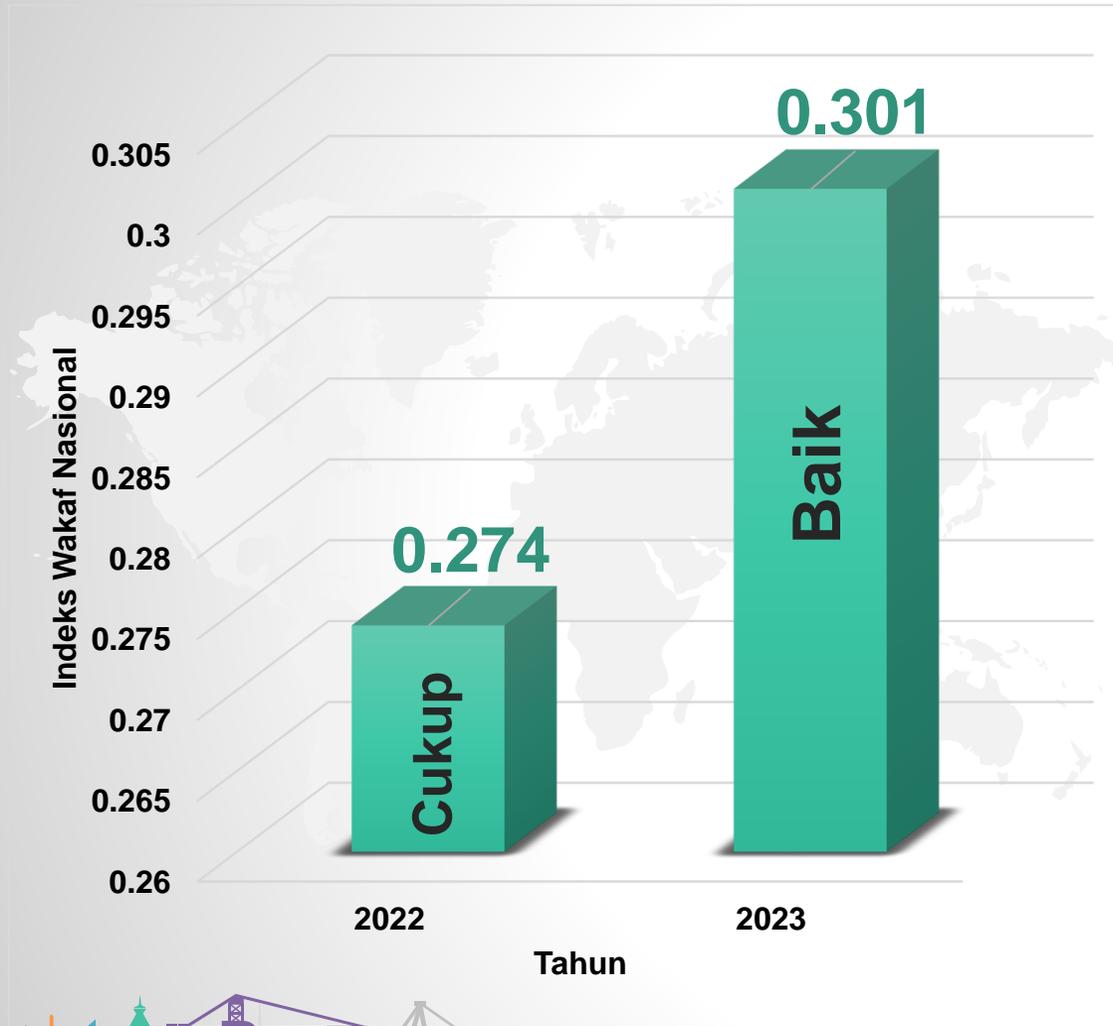


Nilai	Kategori
$<0,100$	<i>Sangat Kurang</i>
$\geq 0,100$ dan $<0,150$	<i>Kurang</i>
$\geq 0,150$ dan $<0,300$	<i>Cukup</i>
$\geq 0,300$ dan $<0,400$	<i>Baik</i>
$\geq 0,400$	<i>Sangat Baik</i>



# PEMBAHASAN HASIL

# Indeks Wakaf Nasional (IWN) 2022 & 2023



□ Peningkatan IWN dari **0,274 (2022)** menjadi **0,301 (2023)**

□ *Besar peningkatan*



# IWN 2022 & 2023 Per Provinsi



2022				2023			
NO	PROV	IWN 2022	KATEGORI	NO	PROV	IWN 2023	KATEGORI
1	BANTEN	0,587	Sangat Baik	1	ACEH	0,645	Sangat Baik
2	RIAU	0,580	Sangat Baik	2	RIAU	0,544	Sangat Baik
3	KEPULAUAN RIAU	0,447	Sangat Baik	3	LAMPUNG	0,467	Sangat Baik
4	ACEH	0,416	Sangat Baik	4	JAWA TENGAH	0,464	Sangat Baik
5	SUMATERA BARAT	0,401	Sangat Baik	5	KALIMANTAN BARAT	0,456	Sangat Baik
6	PAPUA	0,385	Baik	6	BANGKA BELITUNG	0,424	Sangat Baik
7	PAPUA BARAT	0,359	Baik	7	JAWA TIMUR	0,423	Sangat Baik
8	BENGKULU	0,355	Baik	8	SUMATERA BARAT	0,422	Sangat Baik
9	D.I. YOGYAKARTA	0,337	Baik	9	DKI JAKARTA	0,382	Baik
10	BALI	0,302	Baik	10	KALIMANTAN TIMUR	0,340	Baik
11	DKI JAKARTA	0,293	Cukup	11	SUMATERA UTARA	0,330	Baik
12	JAWA TENGAH	0,266	Cukup	12	SULAWESI SELATAN	0,321	Baik
13	GORONTALO	0,248	Cukup	13	JAWA BARAT	0,314	Baik
14	SUMATERA SELATAN	0,235	Cukup	14	NUSA TENGGARA BARAT	0,312	Baik
15	JAWA BARAT	0,235	Cukup	15	KEPULAUAN RIAU	0,308	Baik
16	NUSA TENGGARA BARAT	0,234	Cukup	16	BANTEN	0,306	Baik
17	JAWA TIMUR	0,232	Cukup	17	GORONTALO	0,286	Cukup
18	KALIMANTAN SELATAN	0,231	Cukup	18	JAMBI	0,285	Cukup
19	KALIMANTAN TIMUR	0,219	Cukup	19	KALIMANTAN TENGAH	0,258	Cukup
20	JAMBI	0,217	Cukup	20	PAPUA BARAT	0,253	Cukup
21	MALUKU	0,215	Cukup	21	BALI	0,248	Cukup
22	SULAWESI TENGGARA	0,214	Cukup	22	SUMATERA SELATAN	0,248	Cukup
23	BANGKA BELITUNG	0,212	Cukup	23	KALIMANTAN UTARA	0,232	Cukup
24	KALIMANTAN BARAT	0,212	Cukup	24	D.I. YOGYAKARTA	0,270	Cukup
25	SULAWESI TENGAH	0,210	Cukup	25	BENGKULU	0,221	Cukup
26	SULAWESI SELATAN	0,196	Cukup	26	MALUKU	0,209	Cukup
27	NUSA TENGGARA TIMUR	0,192	Cukup	27	PAPUA	0,193	Cukup
28	MALUKU UTARA	0,191	Cukup	28	KALIMANTAN SELATAN	0,178	Cukup
29	KALIMANTAN UTARA	0,190	Cukup	29	NUSA TENGGARA TIMUR	0,167	Cukup
30	KALIMANTAN TENGAH	0,189	Cukup	30	SULAWESI TENGAH	0,161	Cukup
31	SULAWESI BARAT	0,184	Cukup	31	SULAWESI UTARA	0,159	Cukup
32	LAMPUNG	0,183	Cukup	32	SULAWESI BARAT	0,146	Kurang
33	SULAWESI UTARA	0,179	Cukup	33	MALUKU UTARA	0,135	Kurang
34	SUMATERA UTARA	0,172	Cukup	34	SULAWESI TENGGARA	0,116	Kurang
<b>IWN NASIONAL 2022</b>		<b>0,274</b>	<b>Cukup</b>	<b>IWN NASIONAL 2023</b>		<b>0,301</b>	<b>Baik</b>

- ❑ Peningkatan jumlah kategori **“Sangat Baik”** dari **5 Provinsi** (2022) menjadi **8 Provinsi** (2023)
- ❑ Peningkatan jumlah kategori **“Baik”** dari **5 Provinsi** (2022) menjadi **8 Provinsi** (2023)
- ❑ Penurunan jumlah kategori **“Cukup”** dari **24 Provinsi** (2022) menjadi **15 Provinsi** (2023)
- ❑ Terdapat **3 Provinsi** (2023) dengan kategori **“Kurang”**

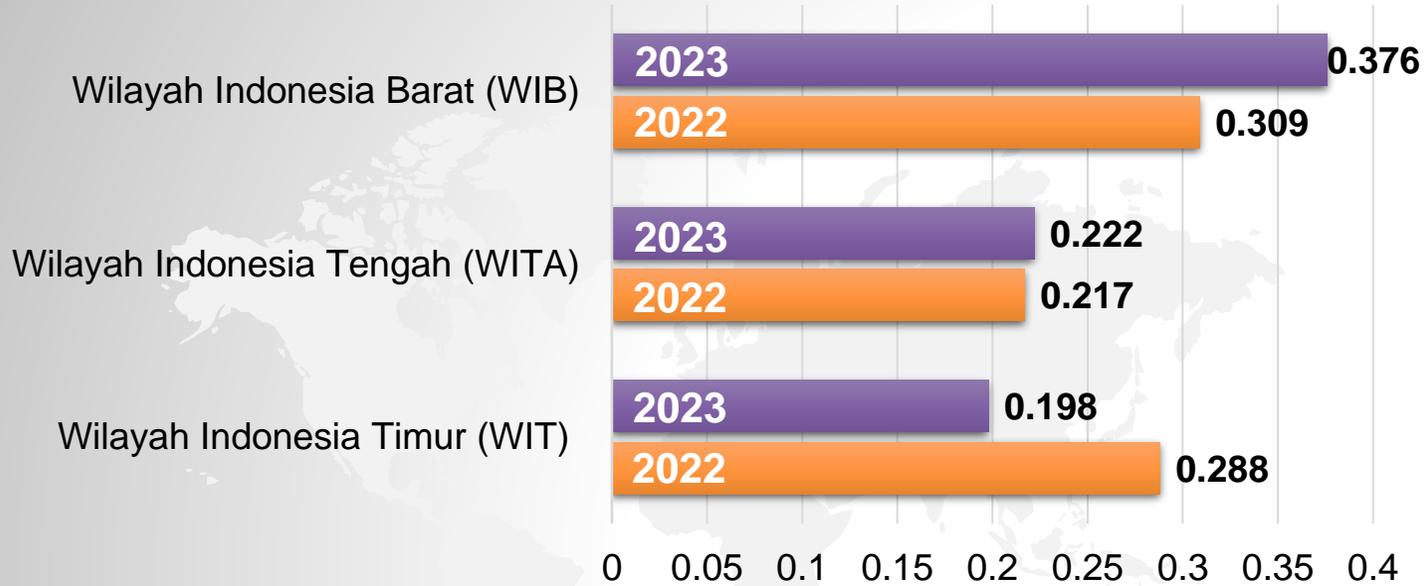
# Pergeseran Jumlah Kategori IWN 2022 ke 2023



2022		2023				
		Sangat Kurang	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik
Sangat Kurang						
Kurang						
Cukup	24		3	10	6	5
Baik	5			5		
Sangat Baik	5				2	3
<b>Total Provinsi</b>	<b>34</b>	<b>34</b>				

- ❑ **Ada 24 Provinsi kategori “Cukup” tahun 2022**, kemudian 24 Provinsi tersebut pada **tahun 2023 berubah kategori** yaitu turun menjadi “Kurang” (3 Provinsi), tetap di “Cukup” (10 Provinsi), meningkat menjadi “Baik” (6 Provinsi), dan meningkat menjadi “Sangat Baik” (5 Provinsi).
- ❑ **Ada 5 Provinsi kategori “Baik” tahun 2022**, kemudian 5 Provinsi tersebut pada **tahun 2023 berubah kategori** menurun menjadi “Cukup” (5 Provinsi).
- ❑ **Ada 5 Provinsi kategori “Sangat Baik” tahun 2022**, kemudian 5 Provinsi tersebut pada **tahun 2023 berubah kategori** menurun menjadi “Baik” (2 Provinsi) dan tetap di “Sangat Baik” (3 Provinsi).





	Wilayah Indonesia Timur (WIT)	Wilayah Indonesia Tengah (WITA)	Wilayah Indonesia Barat (WIB)
■ 2023	0.198	0.222	0.376
■ 2022	0.288	0.217	0.309

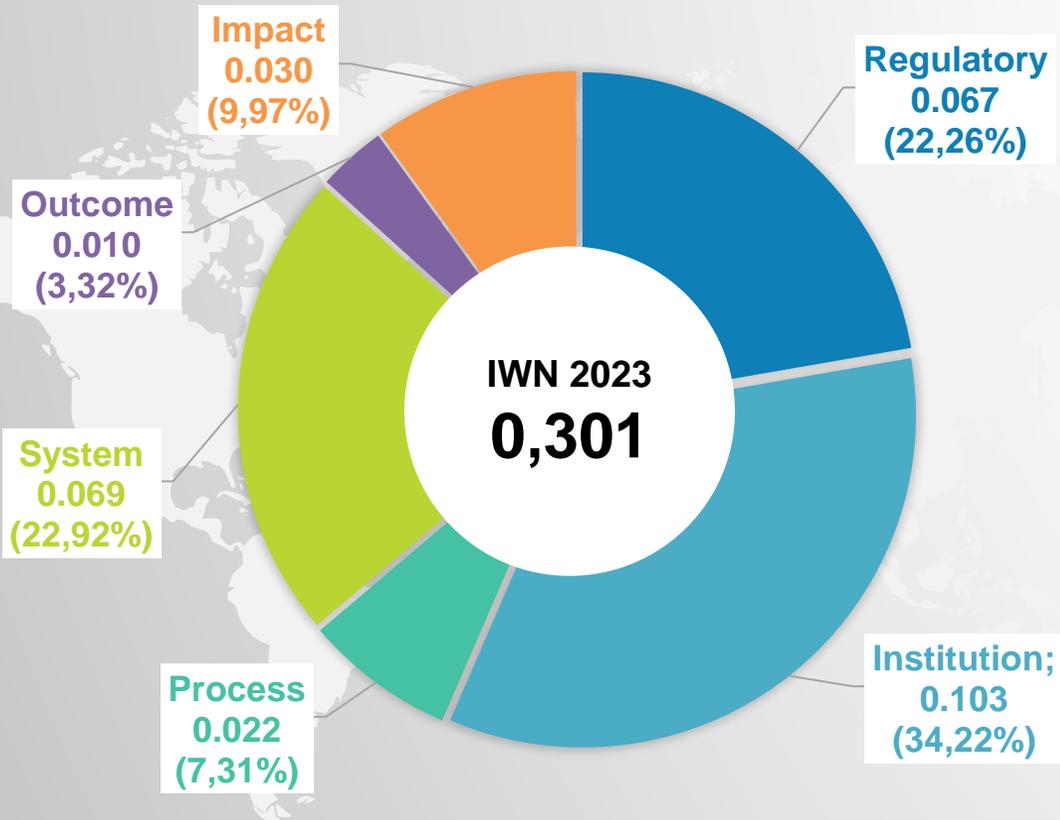
## Secara rata-rata:

1. Wilayah Indonesia Barat (WIB)\* mengalami peningkatan IWN dari 0,309 (2022) menjadi 0,376 (2023), atau **meningkat 22%**.
2. Wilayah Indonesia Tengah (WITA)\*\* mengalami peningkatan IWN dari 0,217 (2022) menjadi 0,222 (2023), atau **meningkat 2%**.
3. Wilayah Indonesia Timur (WIT)\*\*\* mengalami penurunan IWN dari 0,288 (2022) menjadi 0,198 (2023), atau **menurun 31%**.

\*Wilayah Indonesia Barat (WIB), **18 Provinsi:** Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah

\*\*Wilayah Indonesia Tengah (WITA), **12 Provinsi:** Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat

\*\*\*Wilayah Indonesia Timur (WIT) **4 Provinsi:** Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua



- ❑ Urutan kontribusi 6 Faktor yang membentuk nilai IWN 2023 (0,301), dari yang terbesar:
  1. Kelembagaan (*Institution*) 0,103 (**34,22%**)
  2. Sistem (*System*) 0,069 (**22,92%**)
  3. Regulasi (*Regulatory*) 0,067 (**22,26%**)
  4. Dampak (*Impact*) 0,030 (**9,97%**)
  5. Proses (*Process*) 0,022 (**7,31%**)
  6. Hasil (*Outcome*) 0,010 (**3,32%**)
- ❑ **Dapat disimpulkan, 3 Faktor terbesar** yang berkontribusi terhadap Indeks Wakaf Nasional (IWN) 2023 adalah dari Faktor **(1) Institution** (kualitas manajemen nazhir & status nazhir), **(2) System** (legalitas tanah wakaf, kepatuhan syariah, & manajemen informasi public), dan **(3) Regulatory** (dukungan regulasi, anggaran, & pembinaan/pelatihan)



**Terima Kasih**